

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari peran peningkatan mutu sumber daya manusia atau pembentukan modal manusia. Pembentukan modal manusia adalah proses dan memperoleh peningkatan jumlah orang yang mempunyai keahlian pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara (M.L. Jinghan, 2014)

Manusia merupakan modal utama dalam membangun suatu negara menjadi lebih baik, pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju bukan saja diukur dari pendapatan domestic bruto, tetapi juga dari harapan hidup dan pendidikan masyarakatnya. Peran pemerintah juga penting dalam meningkatkan pembangunan manusia, melalui alokasi dana untuk masyarakat yang digunakan untuk peningkatan bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain (Adiwarman A.Karim, 2015)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) dibuat dan dipopulerkan oleh United Nation Development Programme (UNDP) sejak tahun 1996 dalam seri laporan tahunan yang diberi judul “Human Development Report” Indeks ini disusun sebagai salah satu dari indikator

alternatif untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara selain pendapatan nasional perkapita. Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM adalah suatu komposisi yang didasarkan pada tiga indikator, yakni kesehatan, pendidikan yang dicapai dan standar kehidupan.

Indikator kesehatan diukur dengan usia panjang atau tingkat harapan hidup (*life expectancy*), indikator pendidikan diukur dengan rata-rata melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*). Sementara itu standar kehidupan diukur dengan pendapatan riil yang disesuaikan, yaitu kemampuan daya beli (*purchasing power parity*).

Akan tetapi ada tahun 2010 UNDP menyempurnakan metode lama dengan metode baru, dengan mengganti salah satu indikator yaitu angka melek huruf diganti dengan angka harapan lama sekolah. Alasan mengapa angka melek huruf diganti dengan angka harapan lama sekolah adalah bahwa angka melek huruf sudah tidak efektif lagi karena angka tersebut sudah besar diseluruh Indonesia, sehingga tidak efektif lagi jika masih menggunakan angka melek huruf.

UNDP mendefinisika IPM sebagai “*a process of enlarging people’s choice*” atau suatu proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Rendahnya kualitas sumber daya manusia masih menjadi masalah utama di Indonesia. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang masih rendah sebagaimana ditunjukkan oleh indeks pembangunan manusia yang mempunyai

urutan ke 121 dari 187 Negara dan berada di posisi ke 6 dari 10 negara ASEAN pada tahun 2010-2012.

Di Provinsi Sumatera Utara pembangunan manusia meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara mencapai 71,74 angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 71,18. Berikut angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Jika dilihat dari data BPS, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010, Indeks Pembangunan Manusia mencapai 67,09 angka tersebut naik dari tahun sebelumnya. Bayi lahir di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010 memiliki harapan hidup hingga 67,46 tahun. Anak-anak yang pada tahun 2010 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 11,40 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,10 tahun. Pada tahun 2010, masyarakat Sumatera Utara memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp.9,196 juta per tahun, meningkat 143 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Sedangkan pada tahun 2011, Indeks Pembangunan Manusia meningkat sebesar 67,34 atau 0,25 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Bayi yang lahir di Sumatera Utara pada tahun 2011 memiliki harapan dapat untuk hidup hingga 67,63 tahun. Anak-anak yang pada tahun 2011 berusia 7 tahun memiliki harapan untuk dapat menikmati pendidikan selama 11,58 dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,12 tahun. Pada tahun 2011, masyarakat Sumatera Utara memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 9,231 juta rupiah per tahun, meningkat 149 ribu rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2012, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara mencapai sebesar 67,74 dimana angka tersebut naik dibandingkan tahun 2011. Bayi yang lahir di Sumatera Utara pada tahun 2012 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 67,81. Anak-anak yang pada tahun 2012 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 11,60 tahun, lebih lama tahun dibandingkan dengan tahun 2011. Penduduk usia 25 tahun 2012 ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,25 tahun. Pada tahun 2012, masyarakat Sumatera Utara memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 9,266 juta rupiah per tahun, meningkat 155 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2013, Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) Sumatera Utara. IPM Sumatera Utara tahun 2013 mencapai 68,36, tumbuh sebesar 0,62 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bayi yang lahir di Sumatera Utara pada tahun 2013 memiliki harapan untuk hingga 67,94 tahun, lebih lama dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun 2013 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan 11,75 tahun, lebih lama dengan tahun 2012. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke

atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,34 tahun, lebih lama dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, masyarakat Sumatera Utara memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 9,309 juta rupiah per tahun, meningkat 159 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2014, Indeks Pembangunan Manusia mengalami kemajuan mencapai 68,87 angka ini meningkat sebesar 0,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bayi lahir di Sumatera Utara pada tahun 2014 memiliki harapan hidup hingga 68,03 tahun. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,78 tahun, meningkat 0,19 tahun dibandingkan tahun 2013. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,00 tahun, meningkat 0,1 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp.9,391 juta rupiah pada tahun 2014 meningkat Rp.163 ribu dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2015, IPM Sumatera Utara mencapai 69,51, tumbuh sebesar 0,93 persen dibandingkan dengan tahun 2014. IPM Sumatera Utara tahun 2014 dan 2015 masih berstatus “sedang”. Tahun 2015 terdapat 12 kabupaten/kota angka IPM berstatus “tinggi”, sebanyak 17 kabupaten/kota status IPM “sedang” dan 4 kabupaten/kota status IPM “rendah”. Selama periode 2014 hingga 2015, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Angka harapan hidup tahun 2015 sebesar 68,29 tahun, meningkat 0,25 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,82 tahun, meningkat 0,21 tahun dibandingkan pada 2014. Sementara itu,

penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,03 tahun, meningkat 0,1 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp9,536 juta pada tahun 2015, meningkat Rp172 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2016, Indeks Pembangunan Manusia mencapai 70,00 yang berarti status pembangunan manusia di Sumatera Utara menurut kriteria UNDP meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”. IPM Sumatera Utara pada tahun 2016 tumbuh sebesar 0,70 persen dibandingkan tahun 2015. Selama periode 2015 hingga 2016, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 68,33 tahun, meningkat 0,04 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,00 tahun, meningkat 0,18 tahun dibandingkan pada 2015. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,12 tahun, meningkat 0,09 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp 9,74 juta rupiah pada tahun 2016, meningkat Rp 181 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2017, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara mencapai 70,57. Angka ini meningkat sebesar 0,57 poin atau tumbuh sebesar 0,81 persen dibandingkan tahun 2016. Bayi yang lahir di Sumatera Utara pada tahun 2017 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 68,37 tahun, lebih lama 0,04 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun 2017 berusia

7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,10 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,25 tahun, lebih lama 0,13 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, masyarakat Sumatera Utara memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 10,04 juta rupiah per tahun, meningkat 292 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara mencapai 71,18. Angka ini meningkat sebesar 0,61 poin atau tumbuh sebesar 0,86 persen dibandingkan tahun 2017. Bayi yang lahir di Sumatera Utara pada tahun 2018 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 68,61 tahun, lebih lama 0,24 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun 2018 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,14 tahun, lebih lama 0,04 tahun dibandingkan dengan tahun 2017. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,34 tahun, lebih lama 0,09 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, masyarakat Sumatera Utara memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 10,39 juta rupiah per tahun, meningkat 355 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara mencapai 71,74. Angka ini meningkat sebesar 0,56 poin atau tumbuh sebesar 0,79 persen dibandingkan tahun 2018. Bayi yang lahir di Sumatera Utara pada tahun 2019 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 68,95 tahun, lebih lama 0,34

tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun 2019 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,15 tahun, lebih lama 0,01 tahun dibandingkan dengan tahun 2018. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,45 tahun, lebih lama 0,11 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, masyarakat Sumatera Utara memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 10,65 juta rupiah per tahun, meningkat 258 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM Provinsi Sumatera Utara meningkat setiap tahunnya, akan tetapi angka indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai IPM 0,50 sampai 0,79 yang artinya IPM Provinsi Sumatera Utara kelompok wilayah tingkat pembangunan manusia menengah.

IPM digunakan untuk melakukan peningkatan terhadap kinerja pembangunan suatu wilayah di dunia berdasarkan indeks IPM di kelompokkan menjadi 3 yaitu :

- a. Kelompok wilayah dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah (*low human development*), bila memiliki nilai IPM antara 0 sampai 0,50.
- b. Kelompok wilayah dengan tingkat pembangunan manusia menengah (*medium human development*), bila memiliki nilai IPM 0,50 sampai 0,79.

- c. Kelompok wilayah dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi (*high human development*), bila memiliki nilai IPM 0,79 sampai 1.

Maka dapat di simpulkan bahwa indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara tergolong dalam tingkat *medium human development* atau pembangunan manusia yang tergolong sedang yakni kisaran antara 0,50 sampai 0,79.

Pembangunan manusia tidak terlepas dari peran pemerintah dalam pembangunan, karena manusia merupakan modal utama dalam pembangunan suatu daerah. Kebijakan alokasi APBD sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berlakunya desentralisasi fiskal, hal ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat membangun daerahnya masing-masing secara optimal.

Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan pada pembangunan manusia yakni bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan sektor yang sangat vital dalam pembangunan suatu daerah. Biaya tersebut di danai dari anggaran pemerintah menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu bidang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada bidang tersebut. Untuk mengetahui perkembangan realisasi anggaran belanja pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan.

1. Realisasi Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Dalam Rupiah)

a. Realisasi Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Dalam Rupiah)

Pada tahun 2010,Perkembangan realisasi belanja pemerintahan pada bidang pendidikan di provinsi sumatera utara dengan jumlah 183.282.160,708. Pada tahun 2011, Perkembangan realisasi belanja pemerintahan pada bidang pendidikan di provinsi sumatera utara terjadi kenaikan dengan jumlah 247.725.737,235. Pada tahun 2012, Perkembangan realisasi belanja pemerintahan pada bidang pendidikan di provinsi sumatera utara mengalami kenaikan kembali dengan jumlah 336.820.468,338. Sedangkan pada tahun 2013, perkembangan realisasi belanja pemerintahan pada bidang pendidikan di provinsi sumatera utara mengalami penurunan dengan jumlah 221.227.529,495. Pada tahun 2014, perkembangan realisasi belanja pemerintahan pada bidang pendidikan di provinsi sumatera utara kembali terjadi penurunan dengan jumlah 167.279.536,084. Pada tahun 2015 sampai 2016 Perkembangan realisasi belanja pemerintahan pada bidang pendidikan di provinsi sumatera utara tidak terjadi kenaikan maupun peningkatan,kemudian pada tahun 2017 Perkembangan realisasi belanja pemerintahan pada bidang pendidikan di provinsi sumatera utara meningkat secara drastis 2.715.983.721,058. Pada tahun 2018, perkembangan realisasi belanja pemerintahan pada

bidang pendidikan di provinsi sumatera utara terjadi penurunan kembali dengan jumlah 2.699.202.374,116. Kemudian pada tahun 2019 Perkembangan realisasi belanja pemerintahan pada bidang pendidikan di provinsi sumatera utara terjadi kenaikan kembali dengan jumlah 3.041.750.721.775.

b. Realisasi Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dalam Rupiah)

Pada tahun 2010 Realisasi Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan Pada Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah 126.592.227,484. Pada tahun 2011, Realisasi Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan Pada Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dengan jumlah 91.175.647,336. Pada tahun 2012, Realisasi Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan Pada Provinsi Sumatera Utara terjadi kenaikan dengan jumlah 179.171.946,623. Pada tahun 2013, Realisasi Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan Pada Provinsi Sumatera Utara terjadi penurunan dengan jumlah 138.989.397,672. Pada tahun 2014, Realisasi Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan Pada Provinsi Sumatera Utara terjadi kenaikan dengan jumlah 154.185.531.688. Pada tahun 2015, Realisasi Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan Pada Provinsi Sumatera Utara kembali terjadi penurunan dengan jumlah 108.491.240,272. Pada tahun 2016, Realisasi Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan Pada Provinsi Sumatera Utara terjadi kenaikan dengan jumlah 163.571. 864,701. Pada tahun 2017

Realisasi Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan Pada Provinsi Sumatera Utara terjadi kenaikan dengan jumlah 215.757.902,253. Pada tahun 2018, Realisasi Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan Pada Provinsi Sumatera Utara terjadi kenaikan drastis menjadi 278.488.486,245. Pada Tahun 2019, Realisasi Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan Pada Provinsi Sumatera Utara terjadi penurunan dengan jumlah 219.910.904,555.

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata.

Anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PPU-VI/2008.

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan, Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan UU No 36 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal

10 persen dari APBD di luar gaji. Realisasi anggaran pada pengeluaran pemerintah daerah pada bidang pendidikan dan kesehatan diharapkan mampu membentuk modal manusia yang merupakan tonggak penting dalam pembangunan suatu daerah.

Dari pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia, mengingat tingkat IPM di Indonesia yang masih menempati posisi 113 dari 188 Negara di seluruh dunia, menurut UNDP (*United Nation Development Programme*). Menurut data BPS Indonesia, Provinsi Sumatera Utara indeks pembangunan manusia menduduki posisi 24 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

Dari uraian diatas maka penting untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu penulis memilih untuk mengangkat judul **Pengaruh Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Utara.**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Terdapat pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Utara.
2. Terdapat pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Utara.

3. Terdapat pengaruh Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan terhadap Peningkatan Indeks pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari perluasan masalah yang muncul maka peneliti membatasi permasalahan yang hanya akan meneliti pada ruang lingkup pengaruh belanja pendidikan dan belanja kesehatan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di provinsi sumatera utara. Data yang diambil dibatasi pada tahun 2010-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.
- c. Untuk mengetahui pengaruh belanja kesehatan dan belanja pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Pemerintah, supaya bisa menjadi bahan sebagai evaluasi belanja kesehatan dan belanja pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- b. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh belanja pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia.
- c. Sebagai bahan masukan atau referensi dalam membuat karya ilmiah berikutnya bagi para peneliti lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
- d. Sebagai bahan studi dan tambahan literatur bagi mahasiswa / mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara khususnya jurusan Ekonomi Pembangunan.